

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tradisional yang hingga kini masih mampu bertahan. Kondisi ini berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional di wilayah dunia Muslim lainnya yang banyak mengalami pergeseran akibat derasnya arus pembaruan dan modernisasi, sehingga meninggalkan bentuk tradisionalnya. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berilmu dan berakhlak mulia. Sistem pendidikan di pesantren umumnya memiliki kekhasan tersendiri, yaitu perpaduan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Keberlangsungan pesantren tidak lepas dari karakter khas yang dimilikinya, yakni tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keislaman, tetapi juga mengandung unsur keaslian budaya Indonesia (indigenous) yang menjadi identitasnya.¹ Penyelenggaraan pendidikan di pesantren umumnya berbentuk asrama yang menjadi sebuah komunitas tersendiri, dipimpin oleh seorang kyai (Tgk) dan dibantu oleh beberapa ustadz. Mereka hidup berdampingan bersama para santri dalam satu lingkungan yang terpadu. Masjid atau mushalla menjadi pusat kegiatan keagamaan, ibadah, sekaligus tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Sementara itu, pondok atau asrama berfungsi sebagai tempat tinggal santri. Seluruh unsur yang ada kyai, ustadz, santri, dan pengasuh hidup bersama layaknya satu keluarga besar.

Kyai memegang kendali penuh atas seluruh aspek kehidupan pesantren. Perannya dapat diibaratkan seperti jantung dalam tubuh manusia yang menjadi pusat kehidupan. Setiap tindakan di luar kebiasaan yang dilakukan ustadz, pengurus pondok, maupun

¹ Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Proses Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 3.

para santri harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kyai. Kyai juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada santri yang melanggar aturan sesuai norma yang telah mengakar dalam tradisi pesantren. Dominannya peran kyai yang cenderung sentralistik dan otoriter tidak lepas dari posisinya sebagai perintis, pendiri, pengelola, pengasuh, pemimpin, sekaligus pemilik pesantren. Secara budaya, posisi ini mirip dengan kedudukan bangsawan feodal yang disebut *kanjeng* di Jawa. Kyai diyakini memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain di sekitarnya, sehingga kerap muncul legenda mengenai keampuhan atau kesaktiannya yang bersifat magis. Sebagai figur paling berpengaruh dalam pesantren, kyai menjadi pengatur utama ritme perkembangan dan keberlangsungan pesantren melalui keahlian, kedalaman ilmu, kharisma, dan keterampilannya.²

Seluruh kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren, mulai dari bentuk dan struktur kelembagaan, jenjang pendidikan, kurikulum yang dijadikan acuan, metode pengajaran yang digunakan, hingga keterlibatan dalam berbagai aktivitas di luar pesantren maupun sistem pendidikan yang diikuti, sepenuhnya berada di bawah kewenangan kyai. Dalam penetapan kebijakan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan aspek manajerial, kyai memegang otoritas utama. Sementara itu, pihak-pihak lain hanya berperan sebagai pendukung atau pelengkap.³

Uraian tersebut mencerminkan realitas peran kyai atau pengasuh dalam pesantren tradisional yang telah menjadi pemahaman umum, bahwa pesantren identik dengan figur kyai sebagai pusat otoritas, pengambil keputusan, dan pengendali seluruh perubahan. Umumnya pesantren masih menganut pola manajemen tunggal (*mono-manajemen*) dan administrasi tunggal (*mono-administrasi*), sehingga kewenangan tidak banyak

² Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 63

³ Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 49.

didelegasikan ke unit-unit kerja yang ada. Faktor keturunan (nasab) juga sangat berpengaruh, di mana posisi kepemimpinan biasanya diwariskan kepada anak kyai tanpa ada penolakan dari komponen pesantren lainnya. Namun, saat ini terlihat adanya kecenderungan kuat bagi pesantren untuk melakukan konsolidasi dalam hal organisasi kelembagaan, terutama pada aspek kepemimpinan dan manajemen. Perubahan ini dipicu oleh berkembangnya bentuk kelembagaan pesantren yang kini tidak hanya menyelenggarakan pendidikan keagamaan, tetapi juga mencakup madrasah dan sekolah umum dengan sistem yang lebih rasional, demokratis, dan terbuka.⁴ Sehingga, ada kecenderungan banyak pesantren yang berinisiatif untuk berinovasi secara kelembagaan sebagai bentuk dan cerminan kepemimpinan kolegiat.⁵

Perubahan pesantren menjadi berbadan hukum yayasan mendorongnya untuk berkembang menjadi organisasi yang bersifat impersonal. Dalam sistem kepengurusannya, pembagian wewenang diatur secara fungsional sehingga seluruh kegiatan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern. Dengan status kelembagaan sebagai yayasan, pesantren berperan sebagai lembaga tertinggi yang menjadi badan hukum sekaligus induk dari seluruh unit pendidikan yang ada di bawahnya. Setiap unit dikelola oleh penanggung jawab masing-masing yang secara hierarkis melapor kepada tingkat pimpinan yang lebih tinggi. Masing-masing unit juga diberikan otonomi untuk mengatur kegiatan internalnya sendiri. Kepemimpinan dalam yayasan dijalankan secara kolektif melalui struktur organisasi yang membagi tugas dan wewenang secara jelas pada setiap bagiannya.⁶

Kemunculan kepemimpinan pesantren berbasis yayasan juga menimbulkan

⁴ Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Yogyakarta: Sipres, 1999), 11.

⁵ Azyumardi Azra, "Pesantren: kontinuitas dan perubahan" Pengantar dalam Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Proses perjalanan* (Jakarta:Paradigma, 1997),xx.

⁶ E. Shobirin Najd, "Perspektif Kepemimpinan dan manajemen Pesantren". M. Dawam Rahaedjo, ed., *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun Dari Bawah* (Jakarta: P3M, 1985), 116.

sejumlah persoalan, seperti apakah pola kepemimpinan tersebut telah benar-benar bersifat demokratis dan terbuka, apakah proses pengambilan kebijakan telah melibatkan seluruh elemen dalam struktur yayasan, serta apakah implementasi kebijakan telah dipersiapkan dengan perangkat pendukung yang memadai. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul seiring dengan dinamika perkembangan zaman saat ini. Namun, terlepas dari permasalahan tersebut, Zamakhsyari Dhofier menjelaskan bahwa tujuan utama pendidikan pesantren bukan sekadar memperluas pengetahuan santri melalui penjelasan materi, tetapi lebih untuk membentuk akhlak, menanamkan semangat, menghargai nilai spiritual dan kemanusiaan, serta melatih sikap dan perilaku yang jujur serta bermoral. Pesantren juga membimbing santri agar menjalani kehidupan yang sederhana dan bersih hati, dengan menempatkan etika agama di atas segala bentuk etika lainnya. Pendidikan pesantren tidak diarahkan untuk mengejar kekuasaan, kekayaan, maupun kejayaan duniawi, melainkan untuk menanamkan bahwa belajar adalah bentuk pengabdian (*ibadah*) kepada Tuhan, semata-mata demi mengharap ridha-Nya.⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan utama lahirnya tradisi pesantren sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam khas Indonesia pada dasarnya tidak ditujukan untuk kepentingan mobilisasi sosial, ekonomi, maupun politik. Namun, seiring dengan perubahan paradigma masyarakat yang terus berkembang dan tidak dapat menghindari pertemuan antartradisi dan sistem, pesantren tidak mungkin terus bertahan menggunakan pola dan sistem lama yang sudah tidak relevan. Pembaruan dan inovasi menjadi langkah yang tak terelakkan, disukai atau tidak, karena perubahan merupakan bagian alami dari dinamika sejarah yang tidak bisa dihentikan. Selama ini, pembaruan yang berlangsung di lingkungan pesantren umumnya masih tergolong wajar karena merupakan respons terhadap tuntutan perubahan sosial. Akan tetapi,

⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 2011), 21.

permasalahan muncul ketika banyak pesantren dengan format baru mulai menyebut dirinya sebagai pesantren “modern” (formal) yang sepenuhnya mengacu pada sistem dan kurikulum pendidikan nasional.⁸

Pendidikan jalur formal merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk manusia Indonesia secara utuh sesuai dengan fitrahnya. Tujuan tersebut mencakup pembentukan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai demokrasi dan hak asasi manusia, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta memiliki kesehatan jasmani maupun rohani. Selain itu, pendidikan formal juga diarahkan untuk menanamkan keterampilan hidup yang bermartabat, membentuk kepribadian yang tangguh, mandiri, dan kreatif, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan kebangsaan. Dengan demikian, pendidikan formal diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan era global.

Perkembangan pendidikan formal di lingkungan pesantren menjadi fenomena menarik untuk dikaji karena menunjukkan dinamika adaptasi lembaga tradisional Islam terhadap tuntutan zaman. Dayah Safinatun Naja sebagai salah satu pesantren di Kabupaten Nagan Raya merupakan contoh konkret bagaimana pesantren tidak hanya mempertahankan nilai-nilai keislaman dan tradisi lokal, tetapi juga berupaya mengintegrasikan sistem pendidikan formal ke dalam struktur kelembagaannya. Fenomena ini menghadirkan ruang eksplorasi yang kaya tentang strategi, kebijakan, dan peran kepemimpinan pesantren dalam merancang masa depan pendidikan yang selaras antara nilai religius dan kebutuhan kompetensi akademik modern.

Penelitian ini juga mendesak dilakukan karena masih minimnya kajian mendalam terkait kebijakan kepemimpinan pesantren dalam mengembangkan pendidikan formal,

⁸ Badrudrut tamam, *Pesantren nalar dan tradisi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 21.

khususnya di wilayah Aceh yang memiliki kekhasan sejarah, budaya, dan regulasi pendidikan berbasis syariat. Di tengah arus globalisasi dan tuntutan standar pendidikan nasional, pesantren dituntut untuk melakukan inovasi tanpa kehilangan identitas keislamannya. Oleh sebab itu, pemahaman yang komprehensif mengenai cara kepemimpinan pesantren merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan formal sangat penting agar dapat menjadi rujukan pengembangan model pendidikan pesantren di masa depan.

Keunikan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang menempatkan kepemimpinan pesantren sebagai aktor sentral dalam pengambilan kebijakan pengembangan pendidikan formal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang banyak menyoroti aspek kurikulum atau manajemen kelembagaan secara umum, penelitian ini menekankan pada dimensi pengambilan keputusan strategis oleh pemimpin pesantren dalam mengelola pendidikan formal tingkat madrasah tsanawiyah. Pendekatan studi kasus di Dayah Safinatun Naja memberikan kesempatan untuk menggali secara mendalam praktik kepemimpinan berbasis nilai lokal dan religius yang berinteraksi langsung dengan sistem pendidikan formal, sehingga menghasilkan kontribusi ilmiah yang orisinal dan kontekstual.

Berdasarkan jabaran konteks penelitian sebagaimana yang telah disajikan di atas terutama sebagai hasil observasi awal di pondok pesantren (Dayah) Safinatun Naja, maka riset ini mengambil judul: Kebijakan pemimpin pondok pesantren dalam mengembangkan pendidikan formal (studi kasus di Dayah Safinatun Naja pulo ie Kabupaten Nagan Raya).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan Pimpinan Pondok dalam menyusun agenda pengembangan pendidikan formal di madrasah tsanawiyah Safinatun Naja?
2. Bagaimana evaluasi Pimpinan dalam menyusun agenda mengembangkan pendidikan formal di madrasah tsanawiyah Safinatun Naja?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagaimana berikut ini.

1. Untuk mengetahui kebijakan Pimpinan dalam menyusun agenda pengembangan pendidikan formal di Madrasah Tsanawiyah Safinatun Naja
2. Untuk mengetahui evaluasi Pimpinan dalam menyusun agenda mengembangkan pendidikan formal di Madrasah Tsanawiyah Safinatun Naja

D. Manfaat Penelitian

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional maupun pendidikan agama Islam, terutama dalam konteks pengembangan program di sekolah. Selain itu, secara teoretis penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin memusatkan kajian pada bidang pendidikan.

Secara Praktis-Empiris, penelitian ini diharapkan berguna antara lain:

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini memberikan pengalaman berharga yang dapat menjadi bekal untuk memperluas wawasan dan pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu pendidikan yang digeluti.
- b. Bagi Lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi kepala sekolah dalam merancang kebijakan pengembangan pendidikan formal di lingkungan pondok pesantren.

- c. Bagi Pembaca, temuan penelitian ini dapat menjadi wawasan yang memotivasi pengasuh atau pimpinan pondok pesantren agar lebih cermat dan tepat dalam mengambil kebijakan terkait berbagai permasalahan pendidikan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dan alur pembahasan penelitian secara menyeluruh. Beberapa istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemimpin. Kebijakan merupakan serangkaian prinsip, konsep, dan landasan rencana yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu tugas, kepemimpinan, maupun tindakan. Istilah ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti pemerintahan, organisasi, sektor swasta, maupun individu, dan berbeda dari peraturan hukum yang bersifat mengikat. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan pemimpin diartikan sebagai keseluruhan proses dan hasil dari perumusan masalah serta langkah-langkah strategis dalam bidang pendidikan yang disepakati bersama, guna mencapai tujuan pendidikan dalam lembaga yang dipimpin.
2. Pengembangan. Pengembangan merupakan usaha pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab, untuk memperkenalkan, menumbuhkannya, membimbing, serta mengembangkan kepribadian yang utuh dan seimbang, serta kemampuan pengetahuan dan keterampilan sesuai potensi individu. Proses ini bertujuan mempersiapkan individu agar mampu mengembangkan dirinya, berkontribusi bagi orang lain, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan demi tercapainya kualitas dan kemandirian pribadi yang optimal. Dalam penelitian ini, pengembangan dipahami sebagai proses perubahan dalam pendidikan agar menjadi lebih baik dari kondisi

sebelumnya, sehingga tujuan lembaga pendidikan dapat tercapai.

3. Pendidikan Formal. pendidikan formal di pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari lembaga pendidikan lain, antara lain:
 - a) keberadaan kyai yang berperan sebagai pendidik sekaligus pemilik pesantren,
 - b) penggunaan kurikulum khas pondok pesantren, dan
 - c) ketersediaan sarana ibadah dan pendidikan

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan dan Orisinalitas Penelitian

1. Nama & Tahun: Nurhayati (2017)

Fokus Penelitian: Mengkaji kebijakan pimpinan pesantren dalam mengintegrasikan pendidikan formal di MTs Pesantren Darussalam, Aceh Besar.

Temuan & Diskusi: Penelitian ini menemukan bahwa pimpinan pesantren menerapkan model kepemimpinan partisipatif, melibatkan guru, santri, dan wali murid dalam setiap perumusan kebijakan. Diskusi menunjukkan bahwa kebijakan yang bersifat inklusif mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan pesantren.

Kesimpulan: Kepemimpinan partisipatif dalam pesantren berkontribusi besar pada perkembangan pendidikan formal, khususnya dalam peningkatan kualitas akademik santri.

Referensi: Nurhayati. *Kebijakan Pimpinan Pesantren dalam Mengintegrasikan Pendidikan Formal di MTs Darussalam*. Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2017, hlm. 55–78.

2. Nama & Tahun: Zulkifli (2018)

Fokus Penelitian: Strategi pengembangan kurikulum pendidikan formal di pesantren modern Al-Manar Medan.

Temuan & Diskusi: Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pimpinan pesantren melakukan adaptasi kurikulum nasional dengan pendekatan integratif berbasis nilai Islam. Diskusi memperlihatkan adanya keseimbangan antara pelajaran umum dan diniyah, yang meningkatkan kompetensi akademik sekaligus spiritual santri.

Kesimpulan: Kebijakan kurikulum integratif efektif dalam mencetak lulusan pesantren yang berdaya saing di dunia modern tanpa meninggalkan identitas keislaman.

Referensi: Zulkifli. *Strategi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Formal di Pesantren Modern Al-Manar*. Medan: Fakultas Tarbiyah UIN Sumatera Utara, 2018, hlm. 101–125.

3. Nama & Tahun: Rahmawati (2019)

Fokus Penelitian: Peran kepemimpinan kiai dalam mengelola MTs di pesantren tradisional Darul Ulum, Jawa Timur.

Temuan & Diskusi: Penelitian menemukan bahwa figur kiai memiliki otoritas penuh dalam menentukan arah kebijakan pendidikan formal, mulai dari rekrutmen guru hingga metode pembelajaran. Diskusi menunjukkan kelebihan model sentralistik ini adalah konsistensi visi pendidikan, meski kelemahannya minim ruang partisipasi guru. Kesimpulan: Otoritas kiai masih menjadi faktor penentu utama dalam pengembangan pendidikan formal di pesantren tradisional.

Referensi: Rahmawati. *Kepemimpinan Kiai dalam Pengelolaan Pendidikan Formal di Pesantren Tradisional Darul Ulum*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Press, 2019, hlm. 87–112.

4. Nama & Tahun: Hasan Basri (2020)

Fokus Penelitian: Kebijakan manajerial pimpinan pondok pesantren dalam meningkatkan mutu MTs di Pesantren Babul Huda, Kalimantan Selatan.

Temuan & Diskusi: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pimpinan pesantren menggunakan pendekatan manajemen mutu total (TQM) dalam mengelola lembaga pendidikan formal. Diskusi menunjukkan bahwa penerapan standar mutu secara bertahap (input, proses, output) meningkatkan prestasi akademik dan akreditasi sekolah.

Kesimpulan: Penerapan prinsip manajemen mutu oleh pimpinan pesantren terbukti meningkatkan kualitas pendidikan formal dan daya saing MTs.

Referensi: Basri, Hasan. *Manajemen Mutu Pendidikan di Pesantren Babul Huda*. Banjarmasin: Antasari Press, 2020, hlm. 45–70.

5. Nama & Tahun: Siti Aminah (2021)

Fokus Penelitian: Dinamika kebijakan pimpinan pesantren dalam mengembangkan pendidikan formal berbasis masyarakat di Pesantren Al-Falah, Jombang.

Temuan & Diskusi: Penelitian menemukan bahwa pimpinan pesantren mengembangkan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat dengan membuka jurusan tambahan di MTs. Diskusi menyoroti bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pesantren mampu memperluas akses pendidikan formal.

Kesimpulan: Kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat menjadikan pendidikan formal di pesantren lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

Referensi: Aminah, Siti. *Kebijakan Pimpinan Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Formal Berbasis Masyarakat*. Jombang: Pustaka Pesantren, 2021, hlm. 133–158.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama & Tahun	Fokus Penelitian	Temuan & Diskusi	Kesimpulan	Referensi

1	Nurhayati (2017)	Kebijakan pimpinan pesantren dalam mengintegrasikan pendidikan formal di MTs Darussalam, Aceh Besar	Pimpinan menerapkan kepemimpinan partisipatif, melibatkan guru, santri, dan wali murid; meningkatkan kepercayaan masyarakat	Kepemimpinan partisipatif berkontribusi besar pada perkembangan pendidikan formal	Nurhayati. <i>Kebijakan Pimpinan Pesantren dalam Mengintegrasikan Pendidikan Formal di MTs Darussalam</i> . Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2017, hlm. 55–78
2	Zulkifli (2018)	Strategi pengembangan kurikulum pendidikan formal di Pesantren Modern Al-Manar, Medan	Adaptasi kurikulum nasional dengan pendekatan integratif berbasis Islam; menyeimbangkan pelajaran umum & diniyah	Kebijakan kurikulum integratif efektif mencetak lulusan berdaya saing tanpa meninggalkan identitas Islam	Zulkifli. <i>Strategi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Formal di Pesantren Modern Al-Manar</i> . Medan: Fakultas Tarbiyah UIN Sumatera Utara, 2018, hlm. 101–125
3	Rahmawati (2019)	Peran kepemimpinan kiai dalam pengelolaan MTs di Pesantren Darul Ulum, Jawa Timur	Kiai memegang otoritas penuh dalam rekrutmen guru dan arah pendidikan; konsistensi visi namun minim partisipasi guru	Otoritas kiai menjadi faktor utama dalam pengembangan pendidikan formal di pesantren tradisional	Rahmawati. <i>Kepemimpinan Kiai dalam Pengelolaan Pendidikan Formal di Pesantren Tradisional Darul Ulum</i> . Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Press, 2019, hlm. 87–112

4	Hasan Basri (2020)	Kebijakan manajerial pimpinan pesantren dalam meningkatkan mutu MTs di Pesantren Babul Huda, Kalimantan Selatan	Penerapan manajemen mutu total (TQM) meningkatkan prestasi akademik & akreditasi	Prinsip manajemen mutu terbukti meningkatkan kualitas pendidikan formal dan daya saing MTs	Basri, Hasan. <i>Manajemen Mutu Pendidikan di Pesantren Babul Huda</i> . Banjarmasin: Antasari Press, 2020, hlm. 45–70
5	Siti Aminah (2021)	Dinamika kebijakan pimpinan pesantren dalam mengembangkan pendidikan formal berbasis masyarakat di Pesantren Al-Falah, Jombang	Kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat; pembukaan jurusan tambahan; dukungan masyarakat memperluas akses pendidikan	Pendidikan formal lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan	Aminah, Siti. <i>Kebijakan Pimpinan Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Formal Berbasis Masyarakat</i> . Jombang: Pustaka Pesantren, 2021, hlm. 133–158

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti Terdahulu	Fokus Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan/Orisinalitas Penelitian Ini
1	Nurhayati (2017)	Kepemimpinan partisipatif dalam integrasi pendidikan formal di MTs Darussalam, Aceh Besar	Sama-sama meneliti kebijakan pimpinan pesantren dalam pengembangan pendidikan formal	Penelitian ini fokus pada Dayah Safinatun Naja, Pulo Ie, Nagan Raya, dengan konteks sosial-budaya lokal yang berbeda
2	Zulkifli (2018)	Strategi kurikulum integratif di Pesantren Modern Al-Manar, Medan	Sama-sama membahas strategi kebijakan dalam pendidikan formal	Penelitian ini lebih menekankan peran kepemimpinan pondok dalam mengembangkan MTs, bukan sekadar kurikulum

3	Rahmawati (2019)	Peran kiai dalam pengelolaan pendidikan formal di Pesantren Darul Ulum, Jawa Timur	Sama-sama meneliti kepemimpinan dalam pengelolaan MTs	Penelitian ini mengkaji kebijakan pimpinan dayah yang bercorak tradisional Aceh, bukan hanya figur kiai secara personal
4	Hasan Basri (2020)	Manajemen mutu (TQM) di MTs Pesantren Babul Huda, Kalimantan Selatan	Sama-sama meneliti kebijakan pimpinan dalam peningkatan mutu pendidikan formal	Penelitian ini menitikberatkan pada strategi kebijakan pimpinan dayah Safinatun Naja, bukan semata implementasi manajemen mutu
5	Siti Aminah (2021)	Kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat di Pesantren Al-Falah, Jombang	Sama-sama membahas kebijakan pimpinan pesantren yang melibatkan masyarakat	Penelitian ini lebih fokus pada studi kasus MTs di Dayah Safinatun Naja, Nagan Raya, yang jarang diteliti sebelumnya

Dari tabel di atas, orisinalitas penelitian ini terletak pada:

1. Lokasi dan konteks unik – fokus pada Dayah Safinatun Naja, Pulo Ie, Nagan Raya, yang belum banyak diteliti.
2. Pendekatan – menekankan kebijakan pimpinan dayah dalam mengembangkan pendidikan formal (MTs), bukan hanya aspek kurikulum atau manajemen mutu.
3. Kontribusi akademik – memberikan gambaran baru tentang pola kepemimpinan pesantren di Aceh dalam menghadapi tantangan pendidikan formal.